Paripurna Perdana DPRD Lampung Usai Lebaran Sepi, 43 Anggota Absen

Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna perdana pasca cuti Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di ruang sidang DPRD Lampung, Senin (30/3/2026). Namun, rapat penting tersebut justru diwarnai rendahnya tingkat kehadiran anggota dewan.

Dari total 85 anggota DPRD Lampung, hanya 39 anggota yang tercatat hadir bersama 5 pimpinan dewan. Artinya, sebanyak 43 anggota lainnya mangkir tanpa kejelasan di forum resmi yang seharusnya menjadi wadah utama menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.

Minimnya kehadiran ini menjadi sorotan, mengingat agenda paripurna membahas sejumlah isu strategis dan krusial. Di antaranya pembicaraan tingkat II laporan panitia khusus (pansus) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung.

Selain itu, rapat juga mengupas hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan selama Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I 2025. Isu ini dinilai penting di tengah tantangan stabilitas pangan yang masih menjadi perhatian publik.

Tak hanya itu, DPRD juga membahas laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan operasional PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) beserta anak perusahaan dan instansi terkait untuk periode 2024 hingga Semester I 2025.

Agenda lainnya mencakup evaluasi kepatuhan atas pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Provinsi Lampung, yang berkaitan langsung dengan transparansi dan

akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Rendahnya partisipasi anggota dewan dalam rapat ini memunculkan pertanyaan publik terhadap komitmen wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya. Pasalnya, kehadiran dalam rapat paripurna bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan tata tertib DPRD.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, rapat paripurna masih berlangsung dengan tertib di tengah kursi-kursi kosong yang mencerminkan lemahnya disiplin sebagian anggota dewan.